PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA

Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M.
Koordinator Staf Khsus SATGAS 115

OCEAN ASSET VALUES

FIGURE 1 - GLOBAL OCEAN ASSET VALUE

The ocean provides wide-ranging value, from food and tourism to coastal protection and much more.

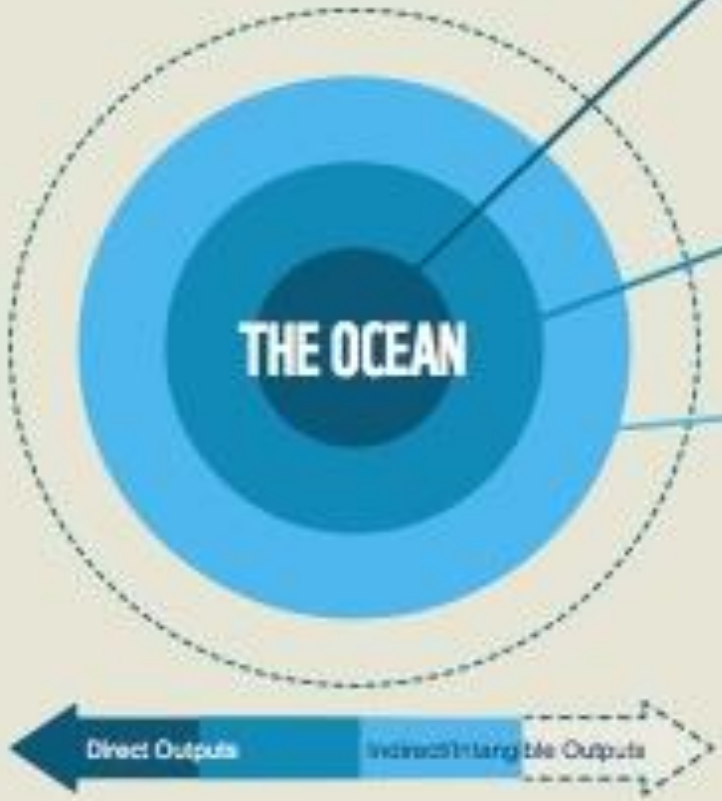

OCEAN-RELATED ACTIVITIES AND ASSETS	TOTAL VALUE
Direct output of the ocean from: Marine fisheries, Mangroves, Coral reefs, Seagrass	US$6.9tn
Trade and transport: Shipping lanes	US$5.2tn
Adjacent assets: Productive coastline	US$7.8tn
Carbon absorption	US$4.3tn

US$24tn

The ocean is valued at more than US$24 trillion; however, its actual value is likely to be much higher because many key ecosystem services are difficult to quantify.

The ocean's asset value would dwarf the world's largest sovereign wealth funds:

- **US$893bn**
  NORWAY
  Government Pension Fund
- **US$773bn**
  ABU DHABI
  ADIA
- **US$757bn**
  SAUDI ARABIA
  SAMA
- **US$653bn**
  CHINA
  China Investment Corp.

Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Dua pertiga wilayah NKRI adalah laut (6,4 juta km2) dan garis panjang pantainya terbesar ke-2 di dunia (108.000 km)

“LAUT ADALAH MASA DEPAN BANGSA”

Presiden Joko Widodo,
Pidato Kenegaraan 20 Oktober 2014

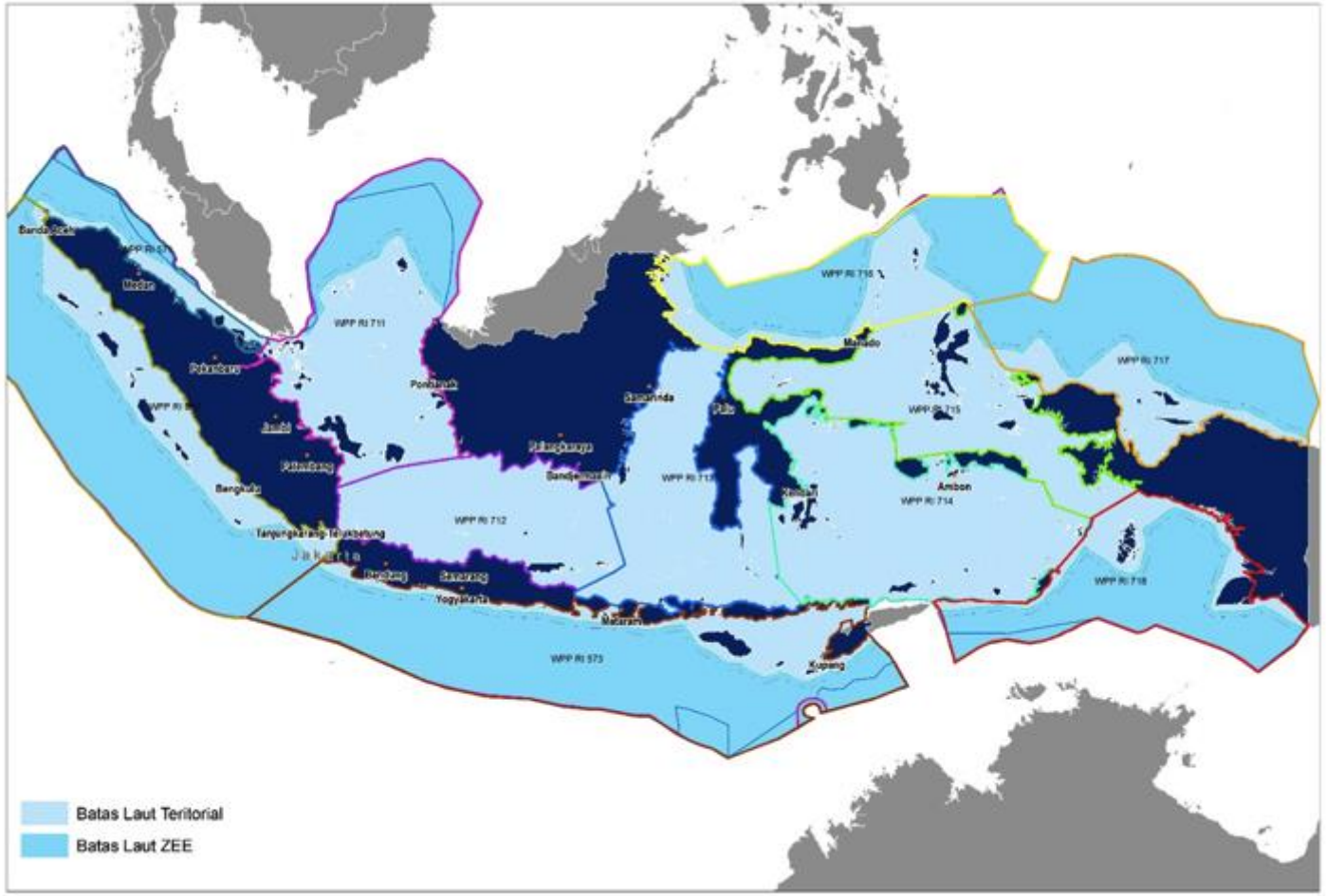

Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan Ketentuan 1982 LOSC

KEBIJAKAN PEMBERANTASAN IUU FISHING

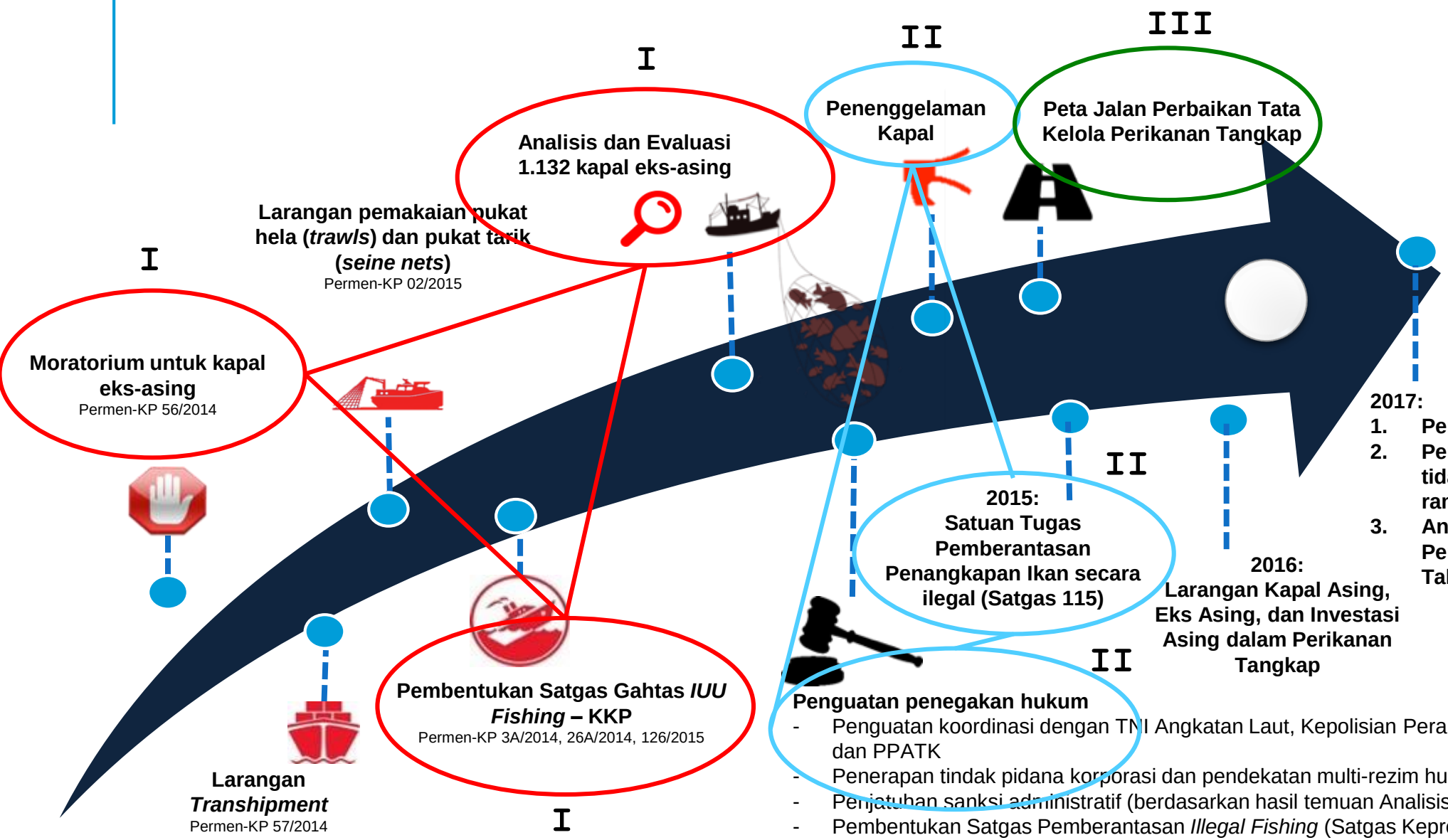

Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan

GOOD GOVERNANCE

2017:

1. **Perbaikan tata kelola perizinan**
2. **Perpindahan dari alat tangkap tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan**
3. **Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan Indonesia (Pembenahan Tahap 2)**

Penguatan penegakan hukum

- Penguatan koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, Direktorat Jenderal Pajak, dan PPATK
- Penerapan tindak pidana korporasi dan pendekatan multi-rezim hukum
- Penjatuhan sanksi administratif (berdasarkan hasil temuan Analisis dan Evaluasi)
- Pembentukan Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* (Satgas Kepresidenan 115)

IUUF merusak ekosistem & keanekaragaman hayati laut

Kekurangan pasokan ikan tangkap juga berdampak terhadap produktifitas ikan budidaya

Penangkapan ikan berlebihan oleh kapal *super trawler*

Dampak kerusakan terumbu karang oleh *bottom trawling*

Illegal fishing terjadi dan berdampak yang besar

Rumah Tangga Nelayan Menurun

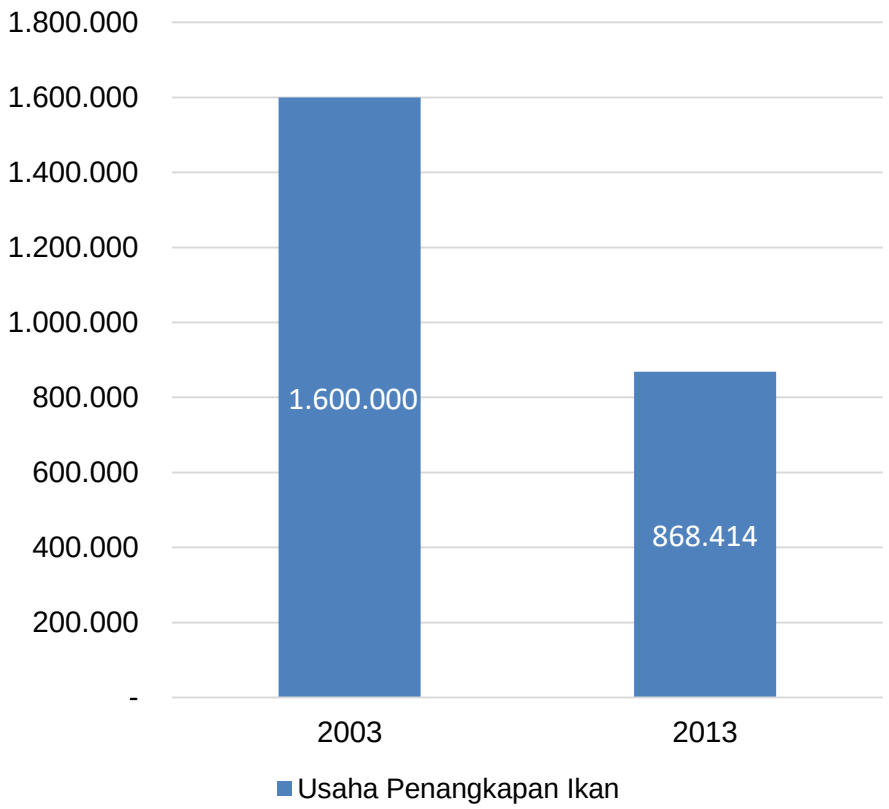

Ikan Kita Dicuri dan Dibawa ke Luar Negeri

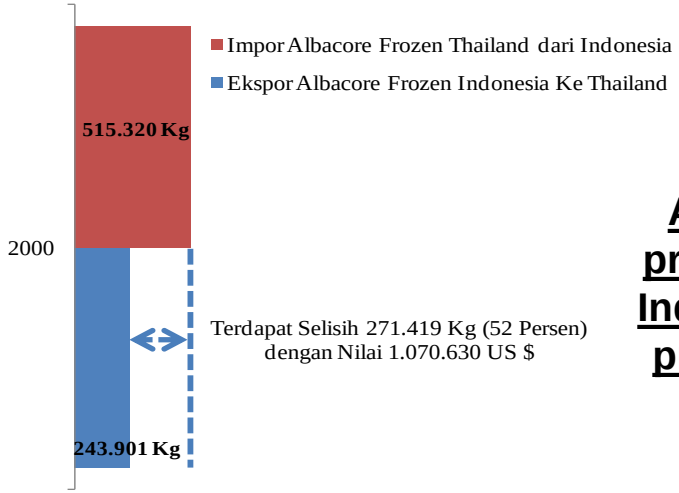

Adanya diskrepensi antara data produk perikanan yang keluar dari Indonesia ke Thailand dengan data produk perikanan yang masuk ke Thailand dari Indonesia

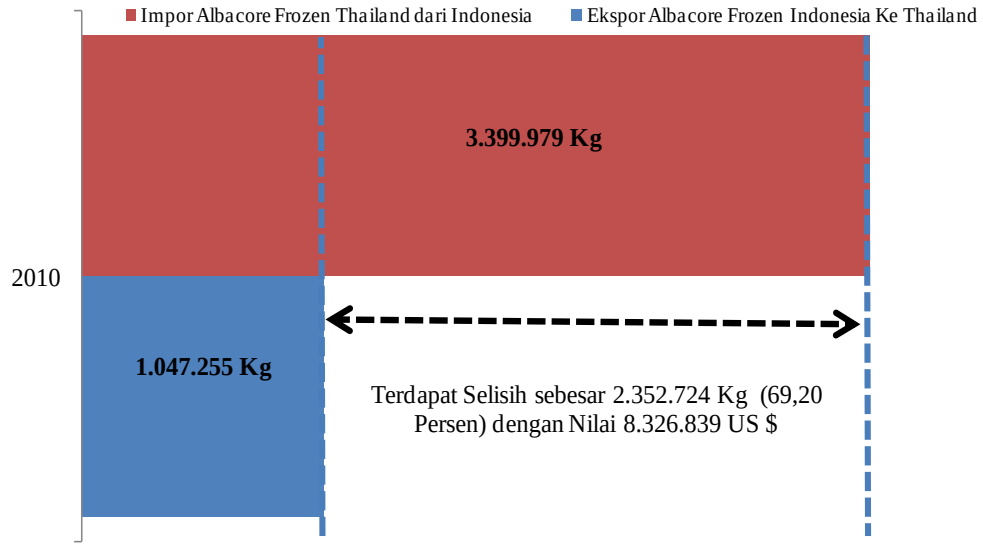

Satu dari Tiga Anak Indonesia Mengalami Stunting

Peningkatan konsumsi ikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan gizi anak

Children from a traditional village in Sumba Island, East Nusa Tenggara.
©UNICEFIndonesia/2014/Hasan

Kondisi Kekurangan Gizi di Indonesia

Indikator	2007	2010	2013
Prevalensi anak balita yang pendek	36,8	35,6	37.2
Prevalensi anak balita yang kurus & sangat kurus	13,6	13,3	12,1
Prevalensi bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) < 2500 gr	11,5	11,1	10,2

Sumber: Riskesdas, 2013

Hampir 9 juta anak Indonesia di bawah 5 tahun terlalu pendek untuk usianya

ANALISIS DAN EVALUASI KAPAL PERIKANAN EKS-ASING

- Kapal eks-asing memiliki kapasitas yang besar (200-600 GT) untuk mengeksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia, sehingga menyebabkan menipisnya kekayaan sumberdaya perikanan Indonesia
- Anev sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan baru di sektor perikanan, yang didasarkan pada temuan dan fakta lapangan (*evidence-based policy*)

MODUS OPERANDI KEJAHATAN PERIKANAN

1. **Pemalsuan Dokumen**

2. **Double flagging & double registered**

3. **Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Izin dan/atau tidak dilengkapi SPB/SLO**

4. **Memodifikasi Kapal Tanpa Izin(**Mark Down, Mengganti call sign, mesin)

5. Menggunakan **Nahkoda dan ABK Asing**

6. Mendaftarkan Pumboat Asing sebagai **Kapal Indonesia,** serta **Memalsukan Dokumen Kependudukan ABK**

7. **Mematikan Transmitter Kapal (**VMS/AIS**)**

8. **Transhipment Ilegal di Laut**

9. **Memalsukan laporan logbook, LKP, dan LKU**

11. **Pelanggaran Fishing Ground**

12. Menggunakan **Alat tangkap terlarang**

13. Tidak memiliki/bermitra dengan **Unit Pengolahan Ikan**

14. **Mendaratkan ikan tidak dipelabuhan pangkalan**

MODUS OPERANDI KEJAHATAN TERKAIT PERIKANAN

1. **Transaksi BBM** ilegal

2. **Tindak Pidana Imigrasi (**Penyelundupan manusia, Pemalsuan dokumen keimigrasian)

3. **Tinda Pidana Bea dan Cukai**

4. **Money laundering**

5. **Tindak Pidana Pajak**

6. **Korupsi**

7. **Pelanggaran Hak Asasi Manusia (**forced labor, human trafficking)

8**. Penyelundupan Narkoba**

KETERPADUAN MULTI UNSUR
PENEGAKAN HUKUM SATU ATAP UNTUK KEJAHATAN PERIKANAN

Pembentukan Satgas 115 (Perpres No. 115/2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan secara Ilegal)

PENENGGELAMAN KAPAL DIMANDATKAN DALAM UU PERIKANAN

Menciptakan *Deterrent Effect* agar tidak ada lagi IUUF di wilayah perairan Indonesia

Pasal 69 UU Perikanan (31/2004 jo. 45/2009)

- Lingkup Kewenangan:
  - **Pasal 69 (3)**: Menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di Wilayah Pengelolaan Perikanan
  - **Pasal 69 (4)**: Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dapat melakukan **tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal** perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup

NO.	BENDERA KAPAL	TOTAL
1	Vietnam	302
2	Filipina	91
3	Thailand	50
4	Malaysia	41
5	Indonesia	27
6	Papua Nugini	2
7	China	1
8	Belize	1
9	Tanpa Negara	1
TOTAL (Nov 2014-Mei 2019)		**516 kapal**

INDONESIA MENINGKATKAN TRANSPARANSI MELALUI *GLOBAL FISHING WATCH* (GFW)

Indonesia merupakan negara yang pertama untuk membuka data VMS ke publik melalui GFW

Apresiasi dari aktor dan aktivis lingkungan, Lenoardo DiCaprio

2017	**Indonesia**
2018	**Peru**
2019	**Panama**

Negara lain mulai mengikuti langkah Indonesia

MASALAH *CREEPING JURISDICTION* DAN *UNRESOLVED AREA*

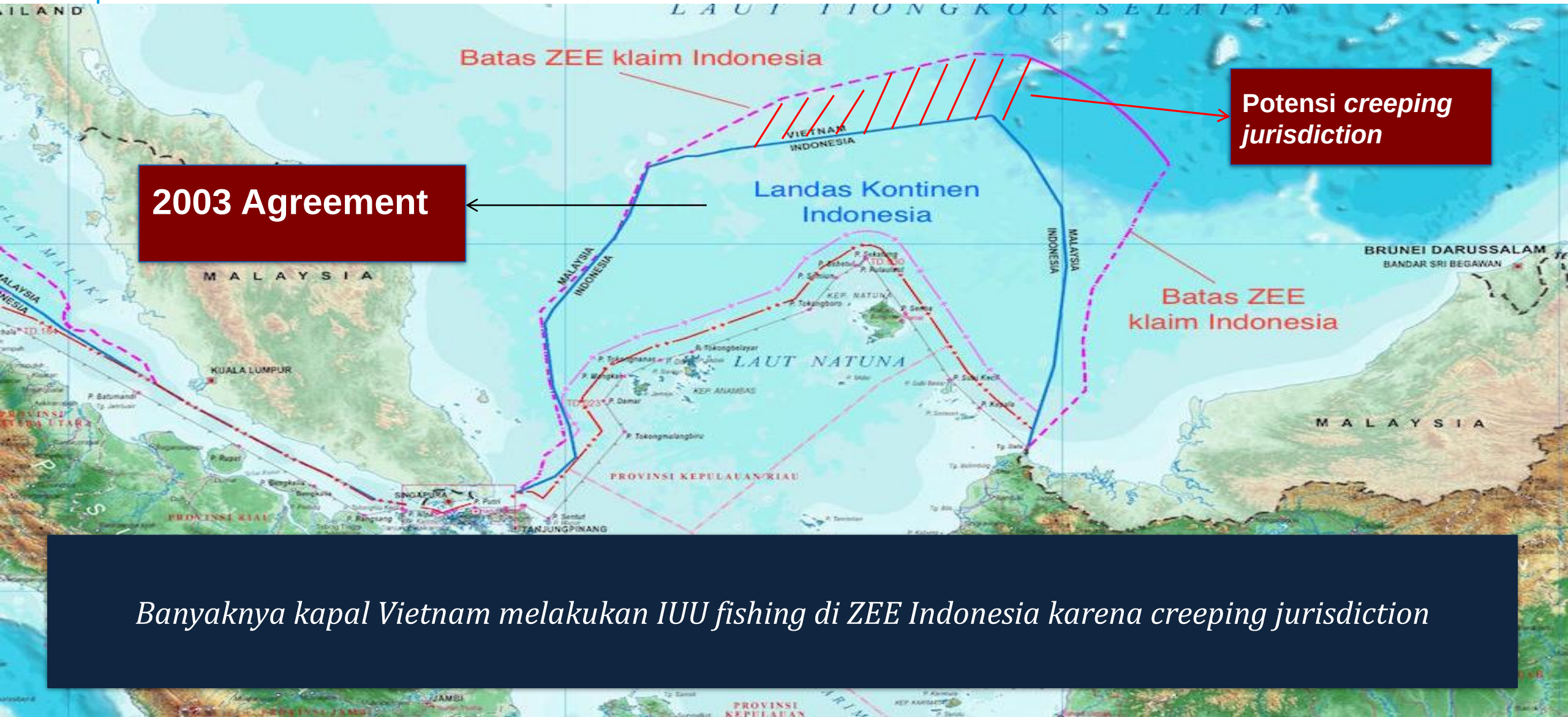

Banyaknya kapal Vietnam melakukan IUU fishing di ZEE Indonesia karena creeping jurisdiction

TRANSNATIONAL ORGANIZED FISHERIES CRIME

SILVER SEA 2

- Melakukan transhipment di perairan papua new guinea dengan kapal eks-Thailand yang menangkap ikan di Indonesia
- Berbendera Thailand
- Hasil perikanan akan didaratkan di Thailand untuk tujuan ekspor

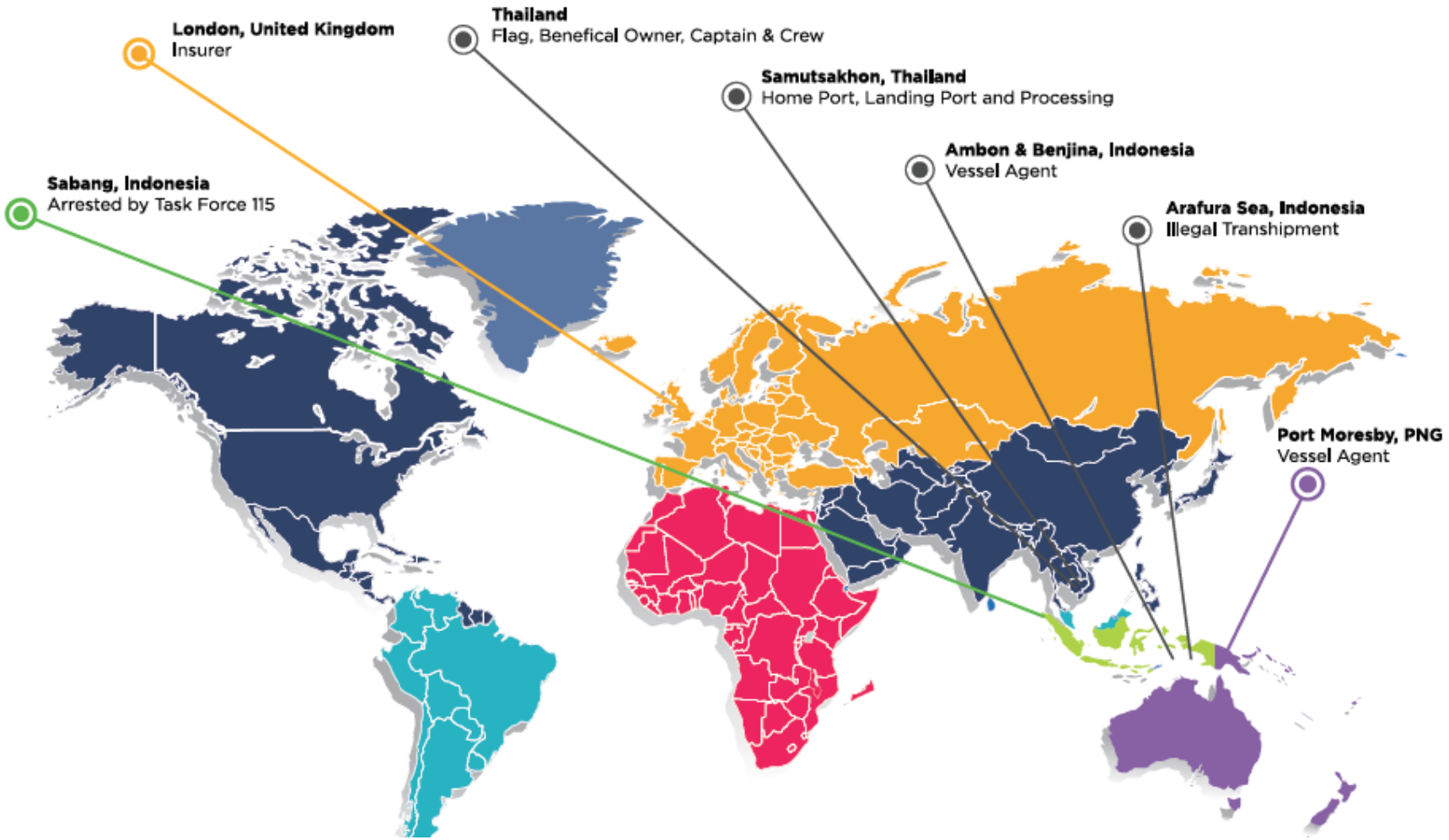

Image Source: http://pescadolus.org/wp-content/uploads/2017/07/24789307036_ef683725d3_o.jpg

TRANSNATIONAL ORGANIZED FISHERIES CRIME

STS 50

- Mengklaim bendera Togo (palsu)
- Pemilik Warga Negara Russia, berkantor di Korea Selatan, bertransaksi melalui Bank di Amerika Serika
- Melakukan IUU di Antartika
- Mendaratkan hasil tangkapan di beberapa negara di Asia
- Kapten Warga Negara Rusia
- Awak Kapal Ukraina dan Indonesia

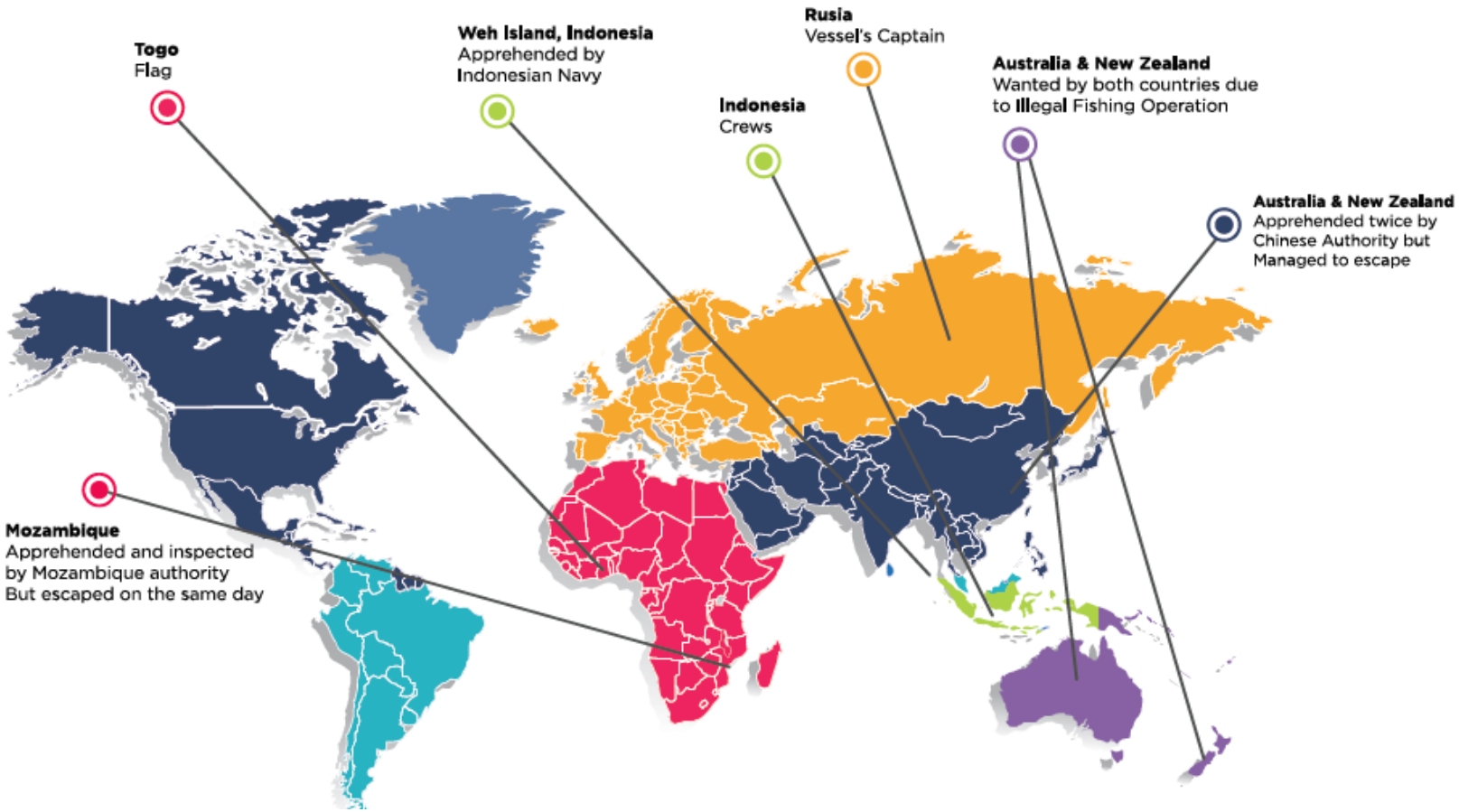

Image Source: http://pescadolus.org/wp-content/uploads/2017/07/24789307036_ef683725d3_o.jpg

TRANSNATIONAL ORGANIZED FISHERIES CRIME

HUA LI 8

- Berbendera Tiongkok
- Melakukan IUU fishing di ZEE Argentina

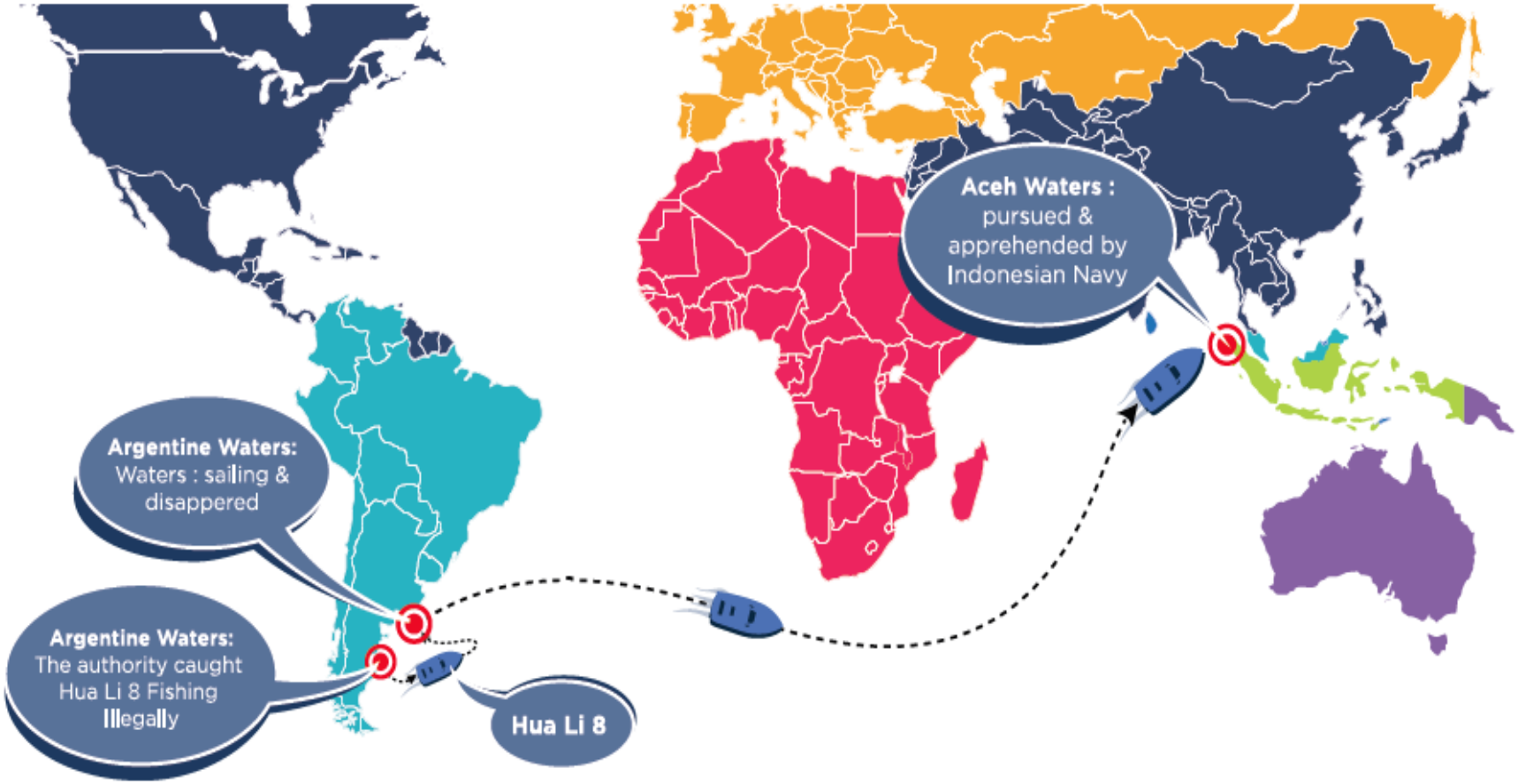

Image Source: http://pescadolus.org/wp-content/uploads/2017/07/24789307036_ef683725d3_o.jpg

TRANSNATIONAL ORGANIZED FISHERIES CRIME

FU YUAN YU 831

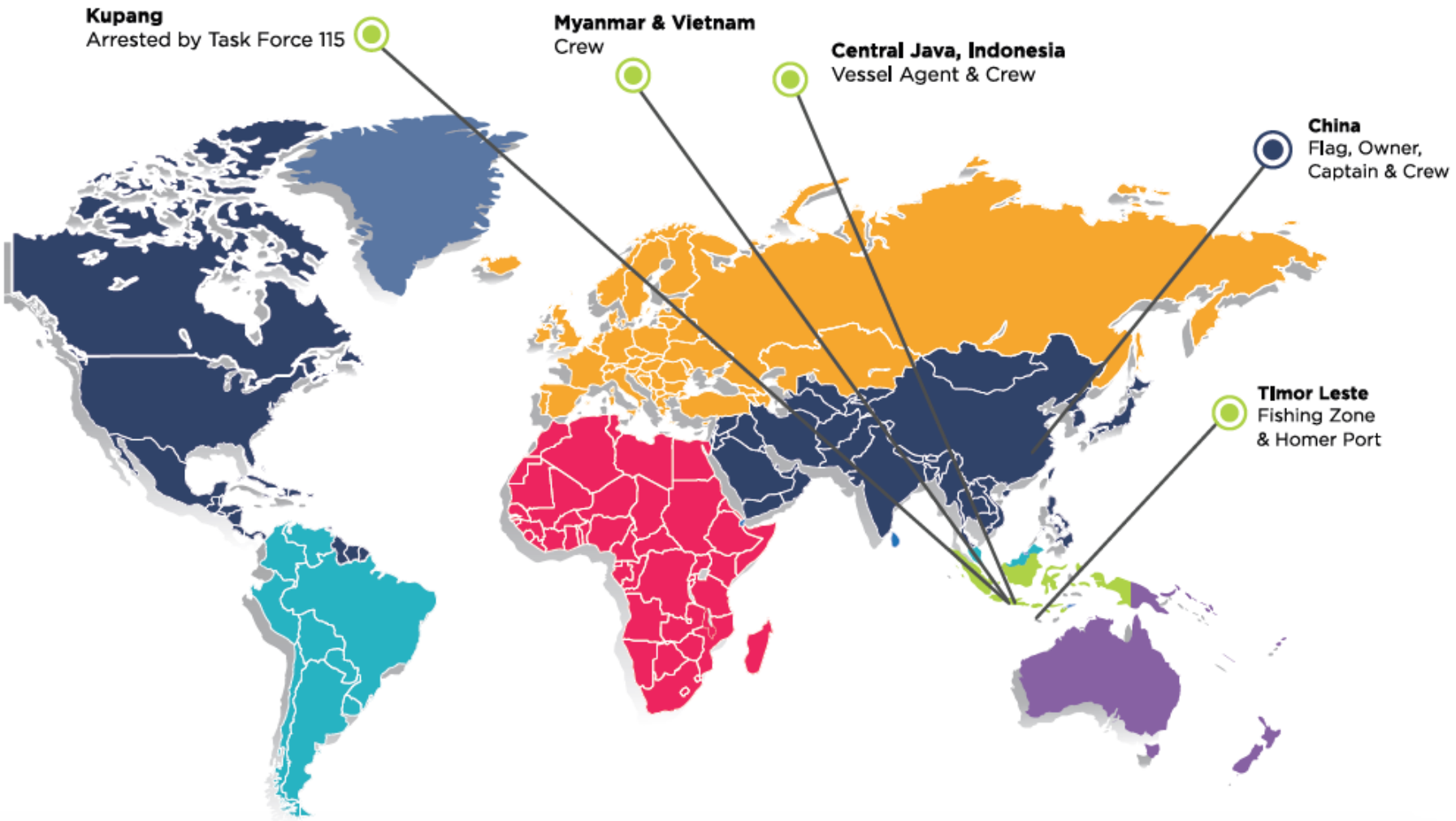

Image Source: http://pescadolus.org/wp-content/uploads/2017/07/24789307036_ef683725d3_o.jpg

TRANSNATIONAL ORGANIZED FISHERIES CRIME

VIKING

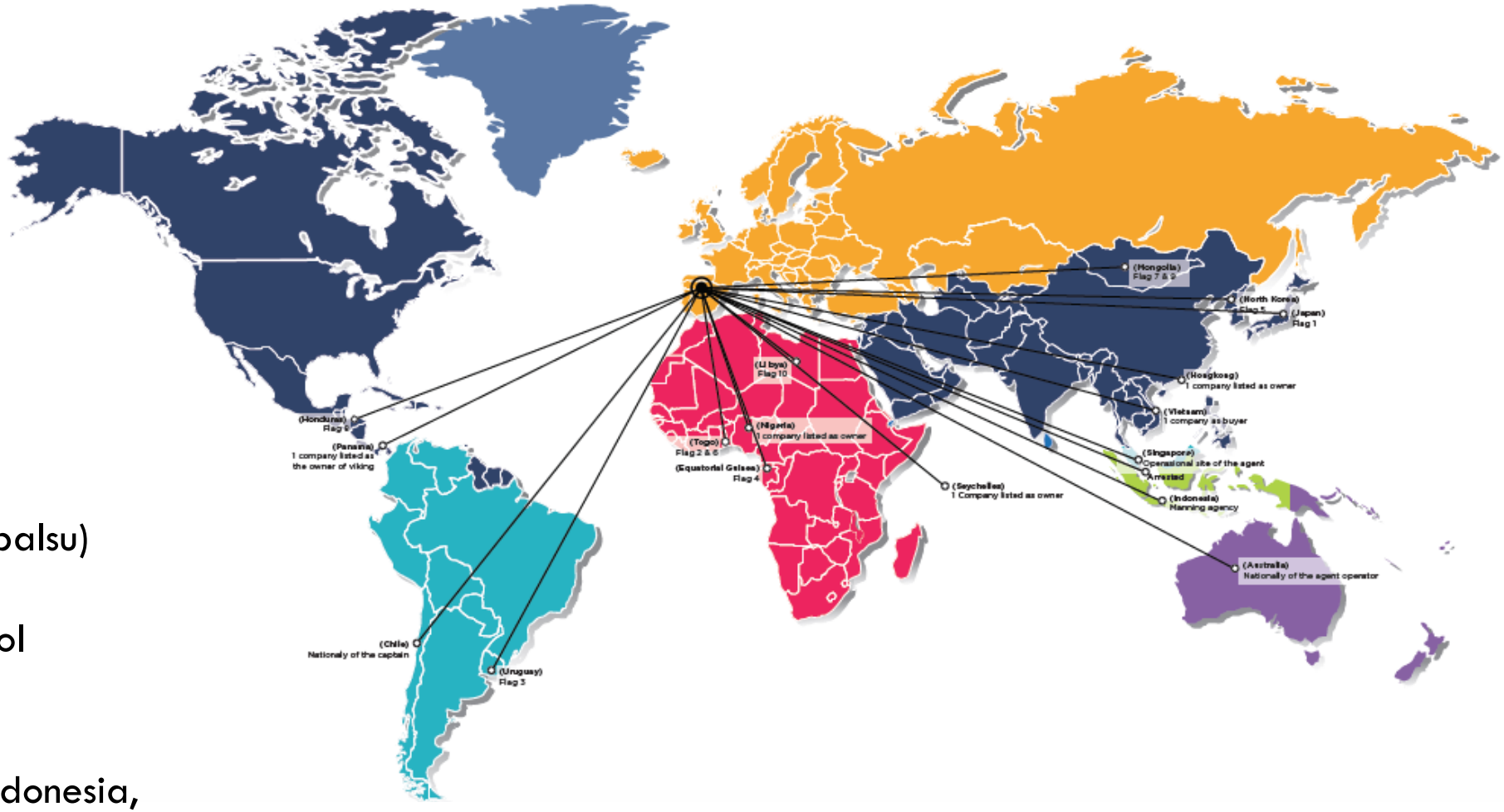

- Mengklaim bendera Nigeria (palsu)
- Memiliki 25 bendera
- Pemilik Warga Negara Spanyol
- Melakukan IUU di Antartika
- Kapten Warga Negara Chile
- Awak Kapal WN Argentina, Indonesia, Myanmar

Image Source: http://pescadolus.org/wp-content/uploads/2017/07/24789307036_ef683725d3_o.jpg

TINDAK PIDANA PERIKANAN SEBAGAI *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*

Dibutuhkan komitmen politik yang kuat, kerjasama antar institusi dalam negeri dan kerjasama internasional untuk memberantas IUUF & kejahatan lainnya di atas kapal perikanan

Image Source: http://pescadolus.org/wp-content/uploads/2017/07/24789307036_ef683725d3_o.jpg

KAPAL IKAN MENYELUNDUPKAN NARKOTIKA

"Sunrise Glory" fishing boat flying Singaporean flag was nabbed by Indonesian Navy on February 7, 2018 in Batam, Riau Islands

Total amount of narcotics seized:1.37 tons of methamphetamine and hid 41 rice sacks

Image Source: http://pescadolus.org/wp-content/uploads/2017/07/24789307036_ef683725d3_o.jpg

UNSUR *TRANSNATIONAL ORGANIZED FISHERIES CRIME* (TOFC)

- *Konsep TOFC merujuk pada tindak pidana yang tergolong **serius**, **lintas negara, terorganisir/terstruktur, dan bertujuan untuk mendapat keuntungan materi**.*

- *TOFC sebagai tindak pidana baru yang berkembang **(new emerging crime) memiliki jangkauan hukum yang lebih luas** karena mencakup segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku industri perikanan*

- *Usaha pemberantasan TOFC harus dilakukan dari berbagai sisi dengan **pendekatan multi-door dan pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability),** sehingga pelaku dapat dijatuhkan hukuman yang menimbulkan efek jera (deterrent effect)*

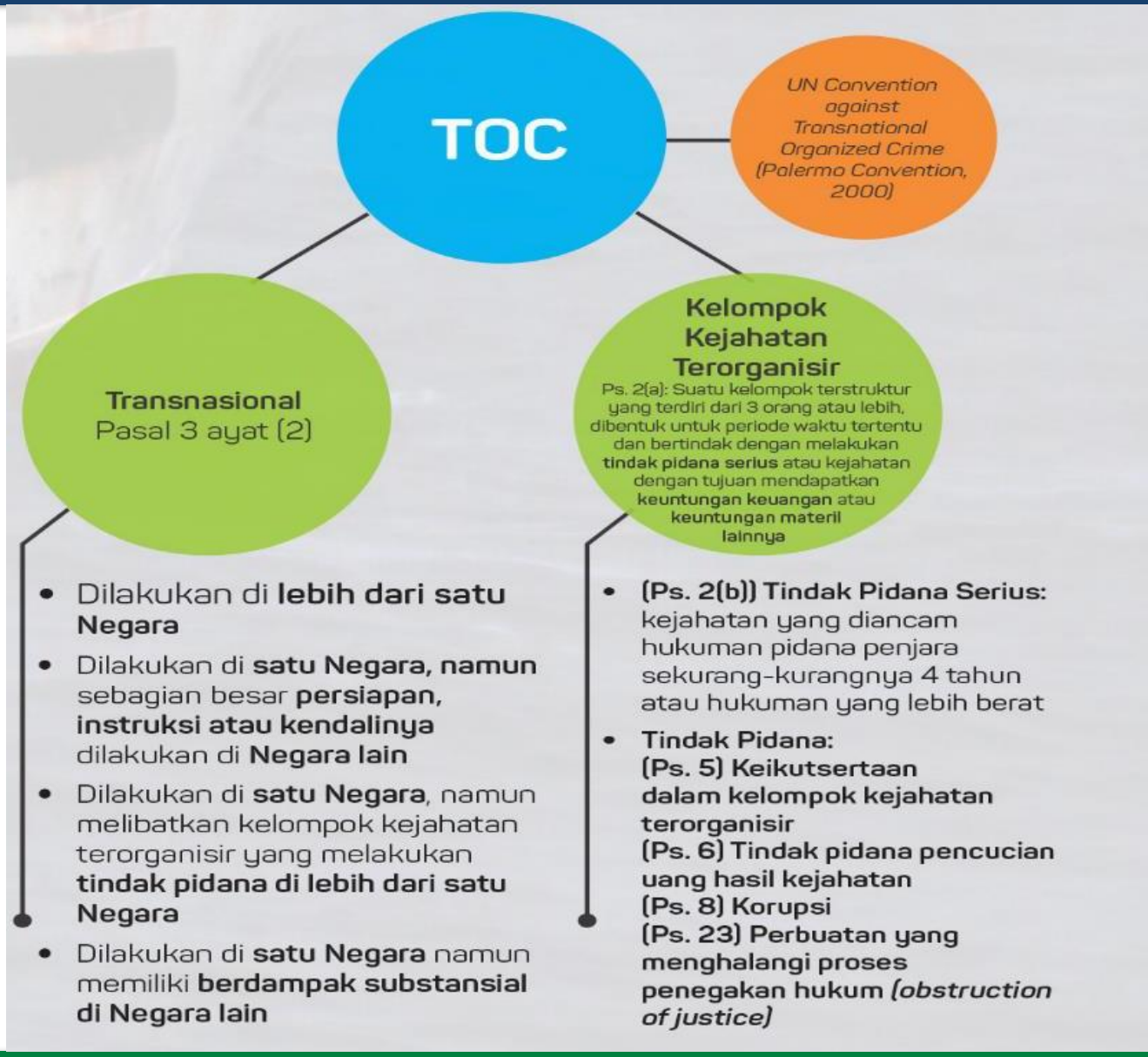

***pidana dengan ancaman hukuman minimal 4 (empat) tahun penjara*

MENGAPA PEMANFAATAN UNTOC UNTUK TOFC?

- Memfasilitasi dan mempermudah **kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan operasi bersama**
- Memperlancar **harmonisasi legislasi** dengan prinsip-prinsip UNTOC
- Memfasilitasi pelaksanaan **prinsip ekstrateritorialitas**
- Memfasilitasi prosedur **ekstradisi dan bantuan timbal balik untuk masalah pidana (*mutual legal assistance)***
- Tersangka dapat diancam **sanksi yang efektif, proporsional dan beralasan berdasarkan hukum dan keadilan**
- **Pemberian jangka waktu yang lama untuk dapat dilaksanakannya sidang** terkait tindak pidana kejahatannya
- Memfasilitasi dan membuka jaringan untuk **pertukaran informasi dan analisis data yang lebih luas**

THE INTERNATIONAL DECLARATION ON TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN THE GLOBAL FISHING INDUSTRY

SUDAH DITANDATANGANI OLEH 15 NEGARA

Faroe Islands, Ghana, Indonesia, Kiribati, Namibia, Norway, Palau, Solomon Islands, Sri Lanka, Timor Leste, Mozambique, Benin, Liberia, Greenland, Maldives.

The international declaration on

transnational organized crime in the global fishing industry

We, the Ministers of Benin, Faroe Islands, Ghana, Greenland, Indonesia, Kiribati, Liberia, Maldives, Mozambique, Namibia, Norway, Palau, Solomon Islands, Sri Lanka and Timor Leste[1];

Encourages other Ministers to support this non-legally binding declaration.

Notes the recommendations and the outcome of the *2nd International Symposium on Fisheries Crime* held in Yogyakarta, Indonesia 10. – 11. October 2016 which was published by the United Nations Office on Drugs and Crime at the occasion of the United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice during its twenty-sixth session in Vienna 22. – 26. May 2017 [2].

Recognize that our countries are dependent on the sea and its resources and the opportunities it holds for the economy, food and well-being of our population and we are determined to support a healthy and thriving fishing industry that is based on fair competition and the sustainable use of the ocean.

Are committed to work towards the fulfilment of the UN Sustainable Development Goals particularly in relation to Goal 14 on “Life Below Water” and Goal 16 on “Peace, Justice and Strong Institutions.”

Are convinced that there is a need for the world community to recognize the existence of transnational organized crime in the global fishing industry and that this activity has a serious effect on the economy, distorts markets, harms the environment and undermines human rights.

Recognize that this transnational activity includes crimes committed through the whole fisheries supply and value chain which includes illegal fishing, corruption, tax and customs fraud, money laundering, embezzlement, document fraud and human trafficking.

Recognize further the inter-continental flow of illegal fish products, illicit money and human trafficking victims in transnational organized crime cases in the global fishing industry and that all regions of the world need to cooperate when investigating such acts

Are convinced that inter-agency cooperation between relevant governmental agencies is essential at a national, regional and international level in order to prevent, combat and eradicate transnational organized crime in the global fishing industry,

PRAKTEK *IUU FISHING* DI *HIGH SEAS* (LAUT LEPAS)

Disebabkan oleh keterbatasan dalam pengawasan di wilayah perairan yang jauh dari yurisdiksi nasional, *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*) menjadi ancaman yang besar di laut bebas. Diestimasikan 11 sampai 26 juta ton hasil tangkapan di laut bebas oleh kapal 54 negara setiap tahunnya sejak tahun 1980 sampai dengan 2003 merupakan hasil dari praktek IUU *Fishing*. (David J. Agnew)

Beberapa modus yang sering ditemukan:

Penggunaan *Flags of Convenience*

Dengan tujuan untuk mengurangi biaya operasi kapal, menikmati kelonggaran pengawasan, dan menghindari kewajiban-kewajiban tertentu, kapal didaftarkan dengan kebangsaan negara asing yang dikenal sebagai *flags of convenience*.

Pergantian kebangsaan kapal dari suatu negara ke negara *flags of convenience* dapat dilakukan dengan biaya sekecil $1.000 dengan waktu 24 jam.

Penggunaan *Port of Convience*

Hasil tangkapan ilegal sengaja didaratkan di pelabuhan yang pengawasannya minimal.

***Transshipment* (Alih muat di laut)**

Kegiatan *transshipment* dapat memfasilitasi kegiatan *illegal fishing* dengan menyembunyikan hasil tangkapannya (dipindahkan ke kapal lain).

Berdasarkan *Global Fishing Watch*, 42% kegaiatan *transshipment* terjadi di laut bebas.

ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING INDEX

Indicator Group	Indicator Name
General/Vulnerability	• Perception of levels of corruption • Gross national income per capita • Volume of catches • Trade balance for fisheries products • Share of global imports
General/Prevalence	• 'Carded' under the EU IUU Regulation • Identified by the National Oceanic and Atmospheric Administration for IUU fishing • Mentions of IUU fishing in media reports
General/ Response	• Mandatory vessel tracking for commercial seagoing fleet • Ratification/accession of UNCLOS Convention • Ratification of UN Fish Stocks Agreement • Mentions in media reports of combating IUU fishing • Have a national plan of action to prevent, deter and eliminate IUU (NPOA-IUU) fishing • Demand for MSC productss • Market state is contracting party or cooperating non-contracting party to relevant RFMOs

Image Source: http://pescadolus.org/wp-content/uploads/2017/07/24789307036_ef683725d3_o.jpg

WORST PERFORMING REGIONS AND OCEANS BERDASARKAN *ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING INDEX*

Worst-performing regions and ocean basins by indicator group

		Type			
		Vulnerability	**Prevalence**	**Response**	**Overall**
Responsibilities	**Coastal**	• Oceania / Western Pacific	• Asia / Western Pacific	• Caribbean and Central America / East Indian Ocean	• Asia / Western Pacific
	Flag	• North America / Eastern Pacific	• Asia / Western Pacific	• Middle East / Western Pacific	• Asia / Western Pacific
	Port	• North America / East Indian Ocean	• Asia / Western Pacific	• Middle East / West Indian Ocean	• Asia / Western Pacific
	General	• Asia / East Indian Ocean	• Asia / East Indian Ocean	• Middle East / West Indian Ocean	• Asia / East Indian Ocean
	Overall	• N America / Western Pacific	• Asia / Western Pacific	• Middle East / West Indian Ocean	• Asia / Western Pacific

Image Source: http://pescadolus.org/wp-content/uploads/2017/07/24789307036_ef683725d3_o.jpg

ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING INDEX

Country	Vulnerability	Prevalence	Response	Overall IUU Score
China	4.44	4.19	3.37	**3.93**
Taiwan	3.56	3.56	3.03	**3.34**
Cambodia	3.32	2.37	4.00	**3.23**
Russia	4.22	2.44	3.00	**3.16**
Vietnam	3.75	3.11	2.68	**3.16**
Sierra Leone	3.14	2.33	3.46	**3.01**
Yemen	3.41	1.30	4.00	**2.96**
Sudan	3.14	1.30	3.71	**2.77**
Liberia	3.72	1.89	2.74	**2.76**
Somalia	3.36	2.19	2.82	**2.75**
Myanmar	3.59	1.30	3.40	**2.73**
Libya	3.43	1.52	3.43	**2.73**
Philippines	3.92	2.19	2.26	**2.71**
Mexico	3.48	1.93	2.83	**2.71**
Indonesia	3.92	2.30	2.14	**2.70**
Cameroon	3.09	1.30	3.71	**2.69**

Urutan berdasarkan yang terparah

Response cukup baik, namun vulnerability sangat tinggi

Image Source: http://pescadolus.org/wp-content/uploads/2017/07/24789307036_ef683725d3_o.jpg

Tantangan Pemberantasan IUU *Fishing*

KEMAMPUAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENANGANI KEJAHATAN

Melihat Kompleksitas Tindak Pidada di Bidang Perikanan, Maka Diperlukan Kemampuan 3A+1 para Penyidik agar dapat mengungkap kejahatan secara tuntas

3A+1

(Wasserman-INECE, 2008)

MENGGUNAKAN MULTI REZIM PENEGAKAN HUKUM

Ability to Detect

Kemampuan untuk Mendeteksi

Ability to Respond

Kemampuan untuk Merespon

Ability to Punish

Kemampuan untuk Menghukum

Ability to Build Perception

Kemampuan untuk Membangun Persepsi bahwa 3As ada

KEMAMPUAN PENDETEKSIAN HARUS TERUS DITINGKATKAN

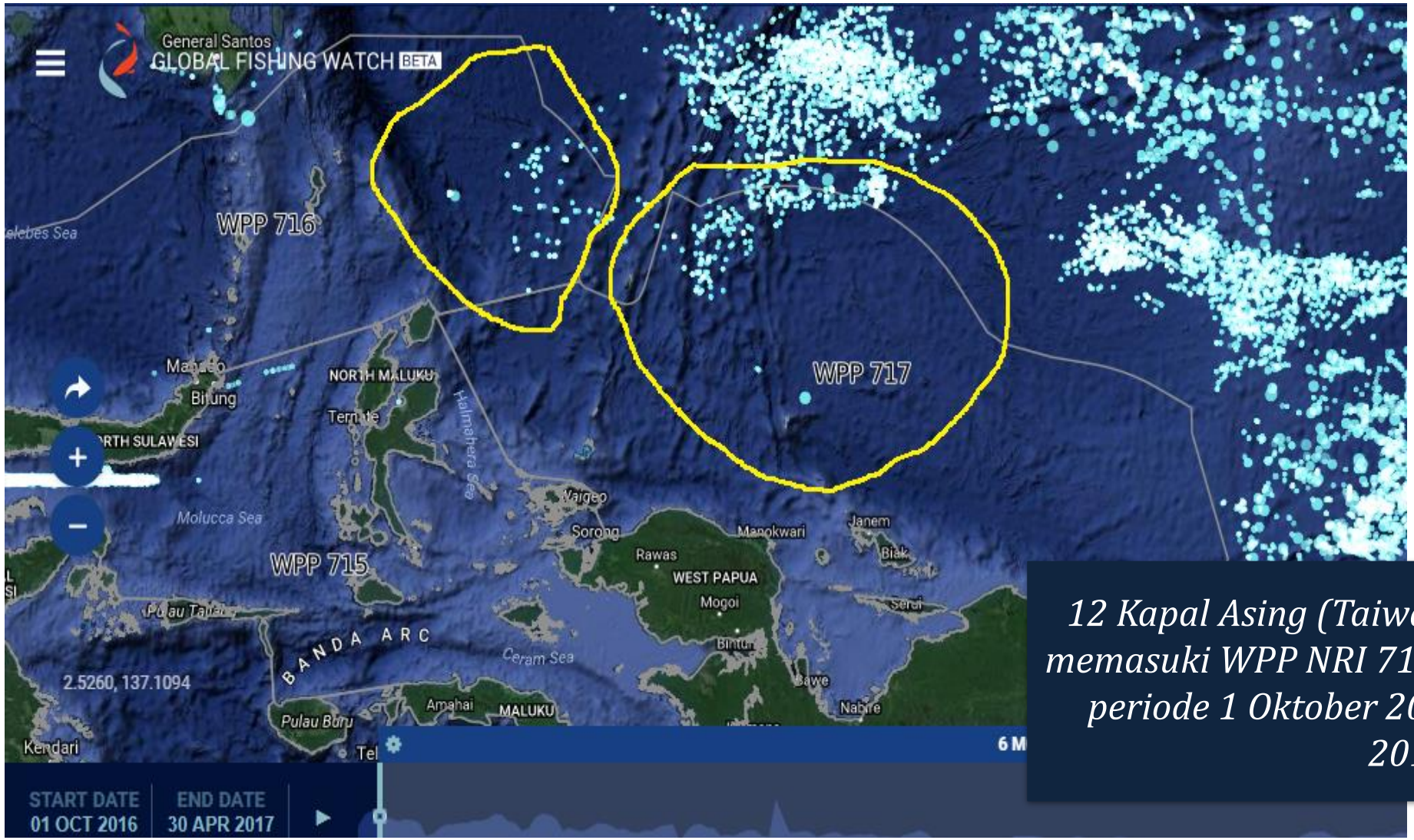

12 Kapal Asing (Taiwan, Jepang, dan Cina) memasuki WPP NRI 717 secara Ilegal selama periode 1 Oktober 2016 sampai 30 April 2017

KEMAMPUAN PENDETEKSIAN HARUS TERUS DITINGKATKAN

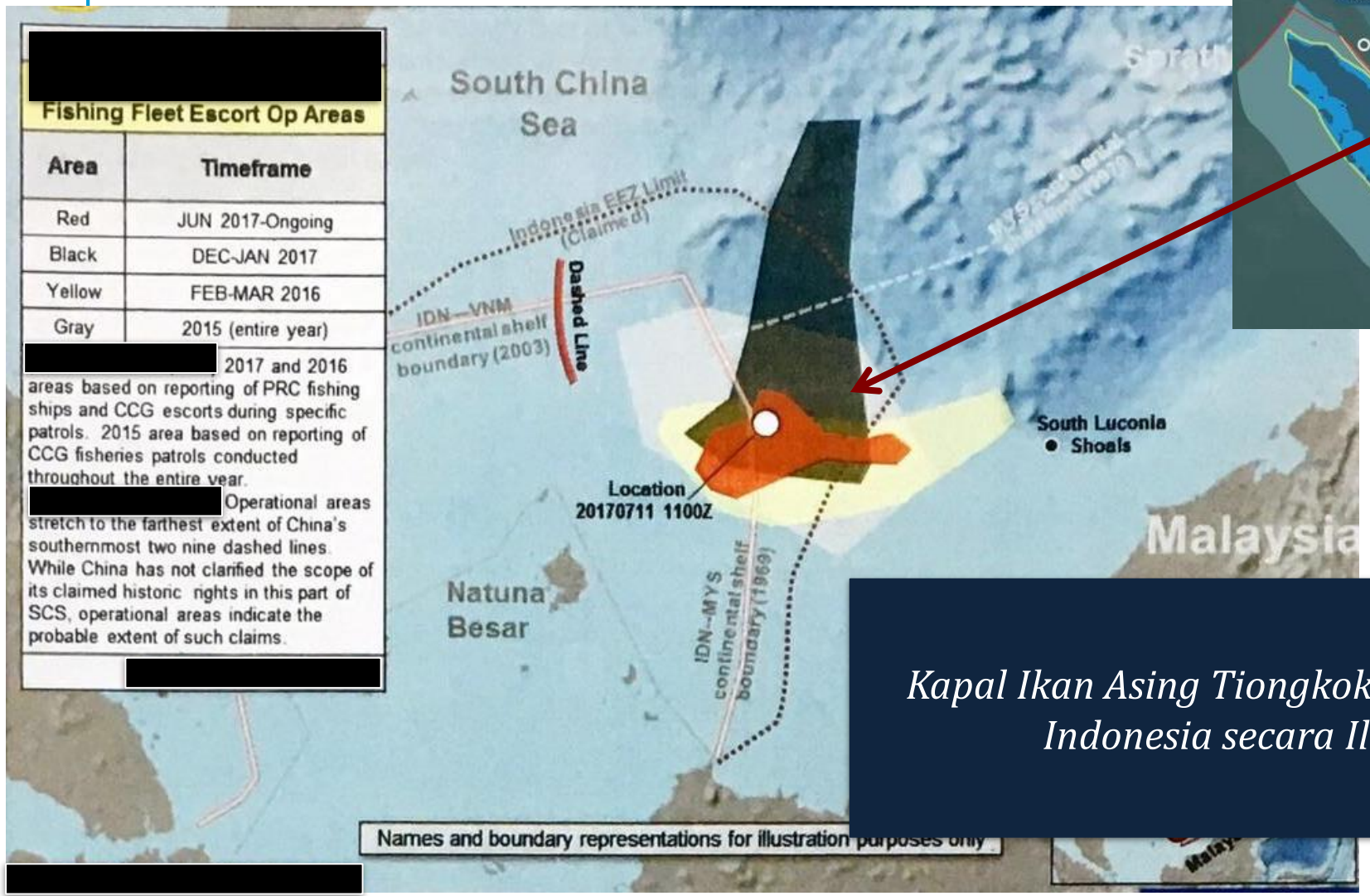

Kapal Ikan Asing Tiongkok memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia secara Ilegal selama 2016 dan 2017

KEMAMPUAN PENDETEKSIAN HARUS TERUS DITINGKATKAN

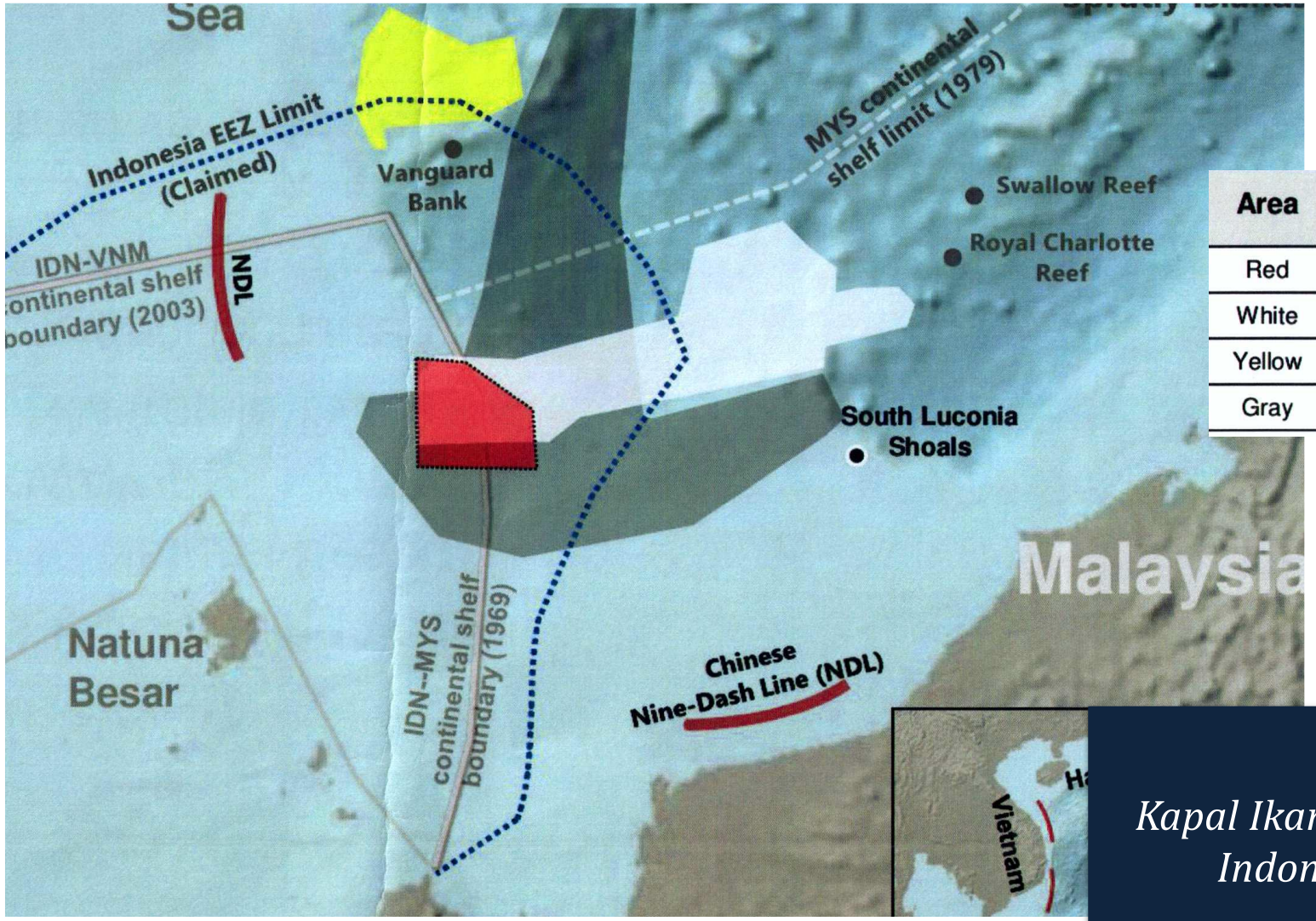

Area	Timeframe
Red	4-8 JAN 2019
White	20 DEC 2018- 3 JAN 2019
Yellow	JUL-AUG 2018
Gray	2016-JAN 2018

Kapal Ikan Asing Tiongkok memasuki ZEE Indonesia sampai 8 Januari 2019

TEMUAN MODUS OPERANDI KAPAL PERIKANAN INDONESIA

Satgas 115 telah melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya Dilakukan di Indonesia (Anev KII) di 11 lokasi **(Batam, Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Pinang, Sorong, Kendari, DKI Jakarta, Tegal, Pekalongan, Ambon, Ternate, Benoa dan Bitung).**

Berbagai Pelanggaran yang Ditemukan:	
• Pembangunan/ modifikasi kapal tanpa Persetujuan Menteri; • *Illegal transshipment;* • Laporan hasil tangkapan ikan yang tidak benar (Laporan Kegiatan Penangkapan/Pengangkutan dan Laporan Kegiatan Usaha); • Ketidakpatuhan pajak; • Melaut tanpa SPB dan SLO; • Perbedaan antara alokasi yang diberikan dengan realisasi kapal; • Pelanggaran HAM;	• Ekploitasi ABK dan tidak ada Perjanjian Kerja Laut (PKL); • Praktik *mark-down* ukuran kapal ikan; • Pelanggaran WPP dan jalur penangkapan ikan; • Mematikan VMS; • Menggunakan BBM bersubsidi secara illegal; • Tidak mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan yang tertera dalam SIPI atau SIKPI; • Penggunaan alat tangkap terlarang; • Penggunaan rumpon tanpa Surat Izin Penggunaan Rumpon (SIPR); dan • Pungutan liar.

MEMBANGUN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM

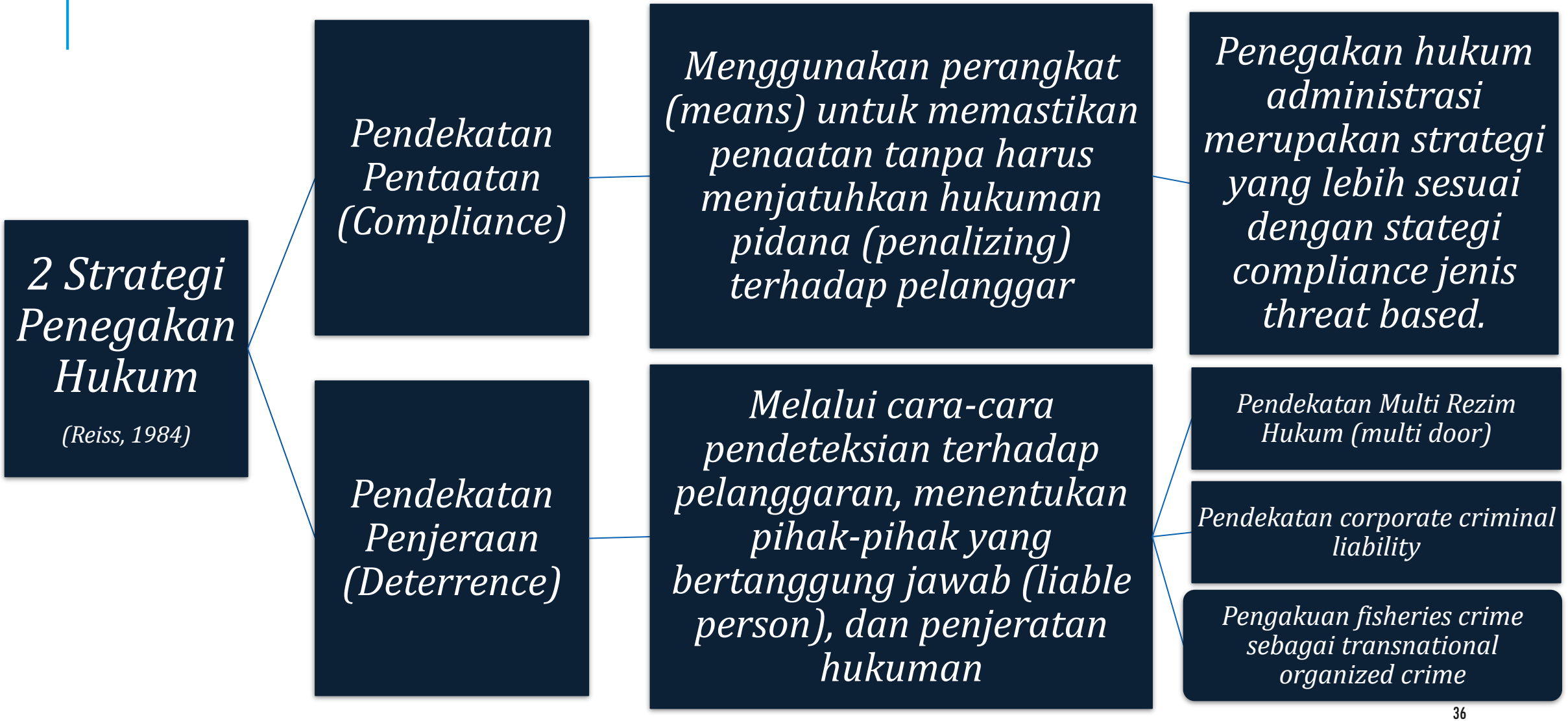

DAMPAK KEBIJAKAN

EKSPOR-IMPOR-NERACA PERDAGANGAN HASIL PERIKANAN

NILAI 2014-2018 (USD MILYAR)

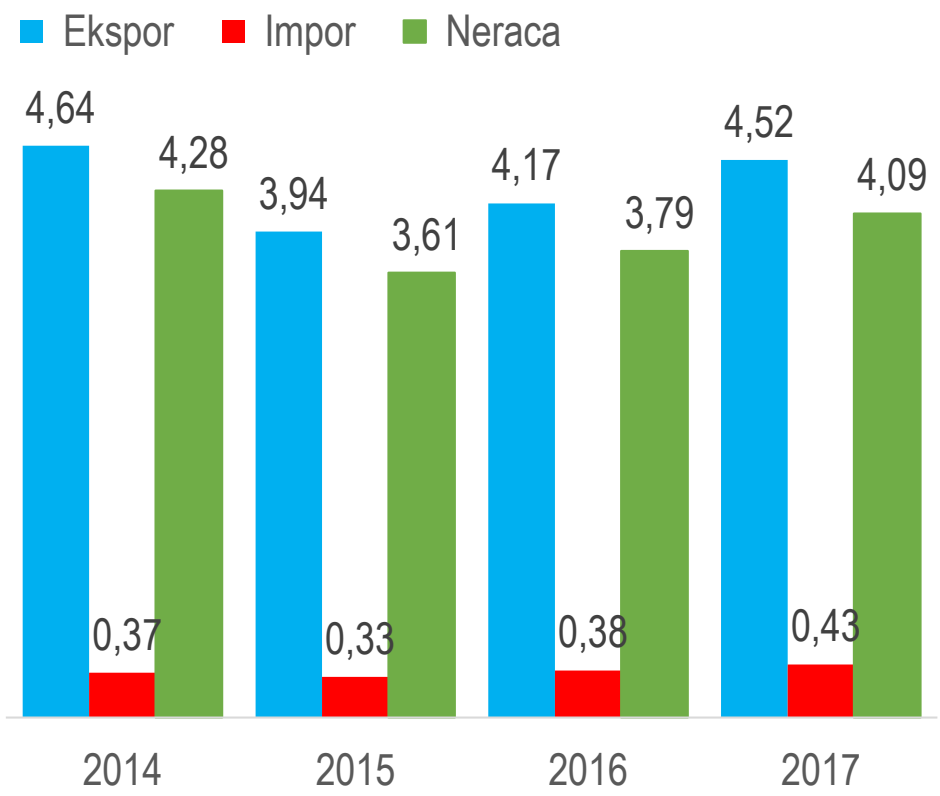

NILAI PERIODE JAN-NOV 2014-2018 YoY (USD MILYAR)

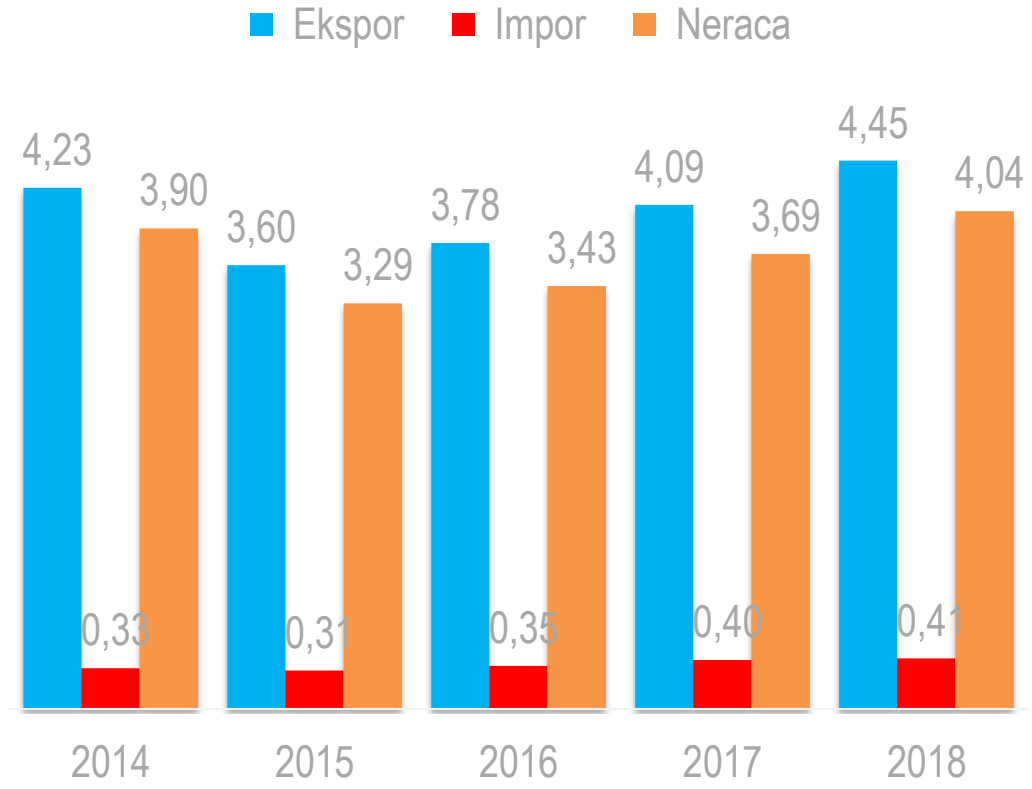

Sumber: BPS diolah Ditjen PDS-KKP

* Angka sementara Jan-Nov 2018

Terdiri dari 480 produk perikanan kode HS 2017 (tidak termasuk pellet HS 230110)

Trend Jumlah Kapal Ikan menurun, namun Produksi Perikanan Meningkat Stabil

Terdapat indikasi perbaikan rasio penangkapan ikan per kapal dan perbaikan stock ikan di laut

Produksi Perikanan Tangkap vs Jumlah Kapal Ikan

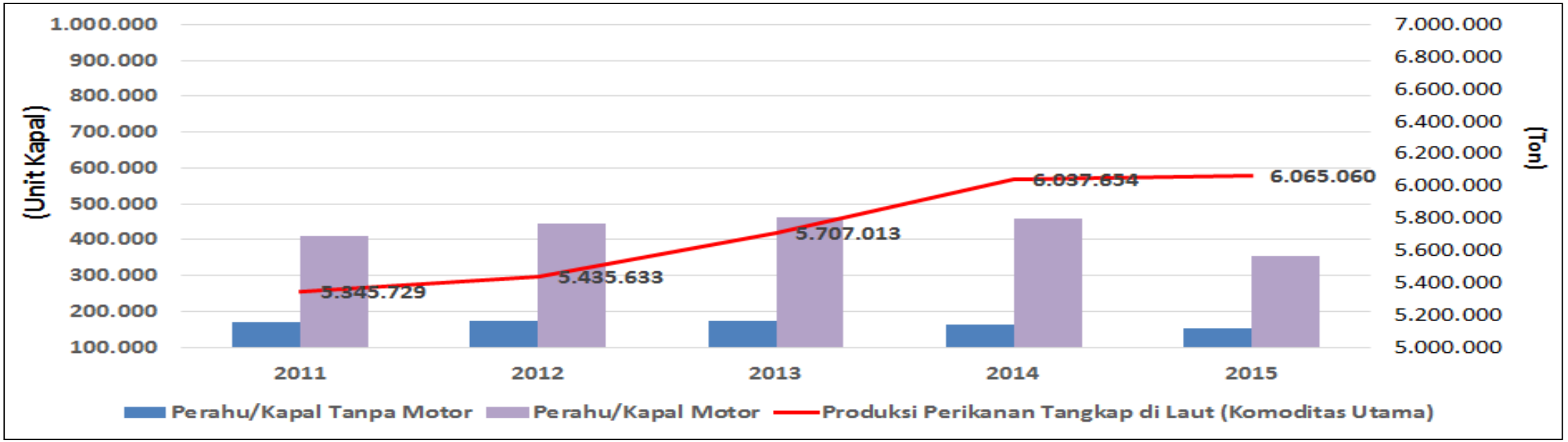

- Terdapat penurunan jumlah kapal penangkap ikan pada tahun 2015 hingga 18% sejak tahun 2012.
- Namun, grafik juga menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap laut untuk komoditas utama meningkat hingga mencapai 11,6% dari 2012 hingga 2015.
- Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan seperti
  - Perbaikan ratio penangkapan ikan perkapal
  - Perbaikan stock ikan di laut

Catatan: Jumlah produksi dalam ton. Sumber: DJPT KKP, 2016

STOCK IKAN MENINGKAT

Indikator pulihnya kesehatan sumber daya laut setelah reformasi kebijakan perikanan tangkap

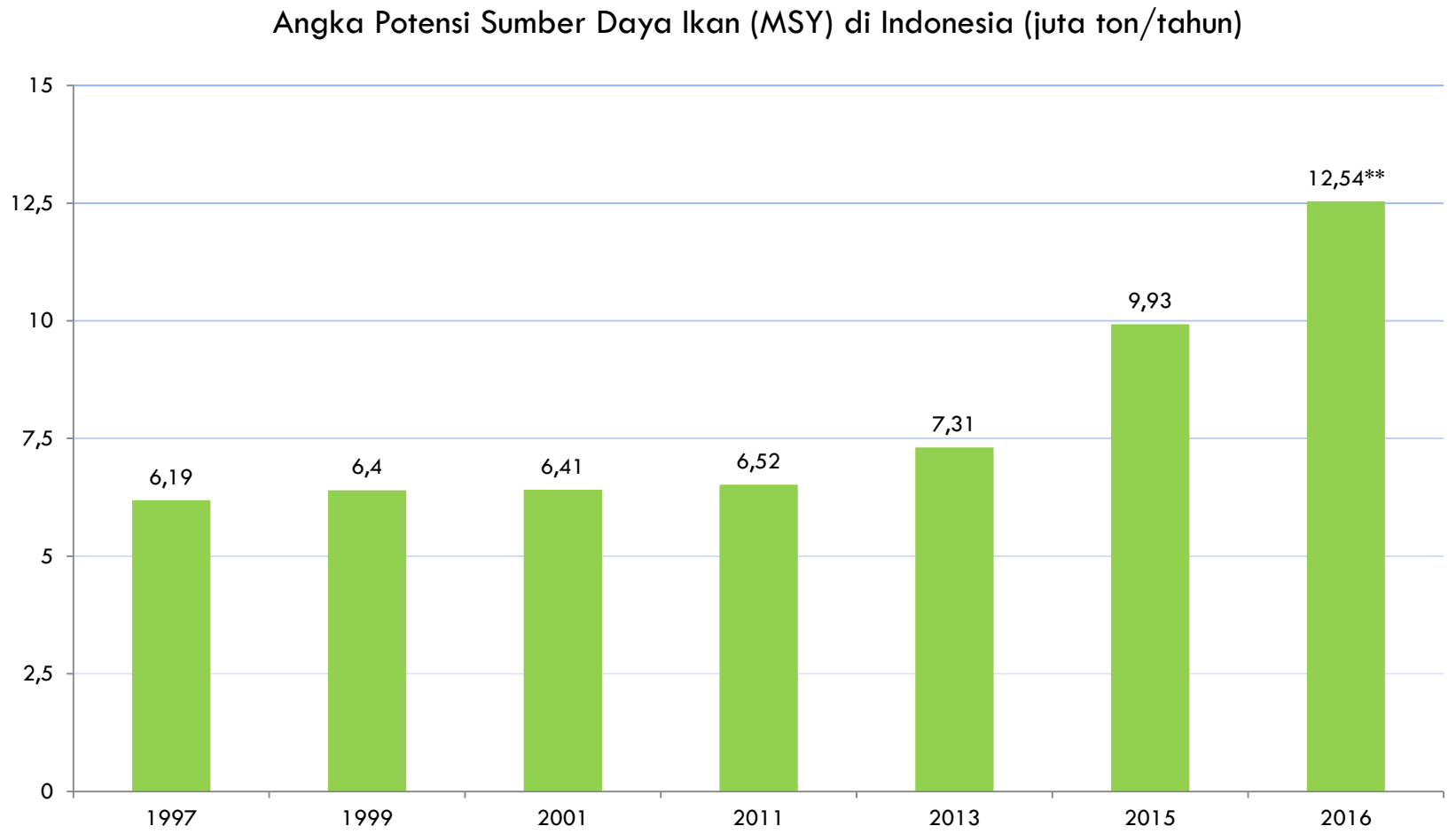

**) Belum ditetapkan
Sumber : Komnas Kajiskan, 2017

KONSUMSI IKAN MENINGKAT

angka **konsumsi ikan**

Capaian konsumsi ikan tahun 2018 adalah 50,69 kg/kapita, sedikit lebih tinggi dari target 50,65 kg/kapita

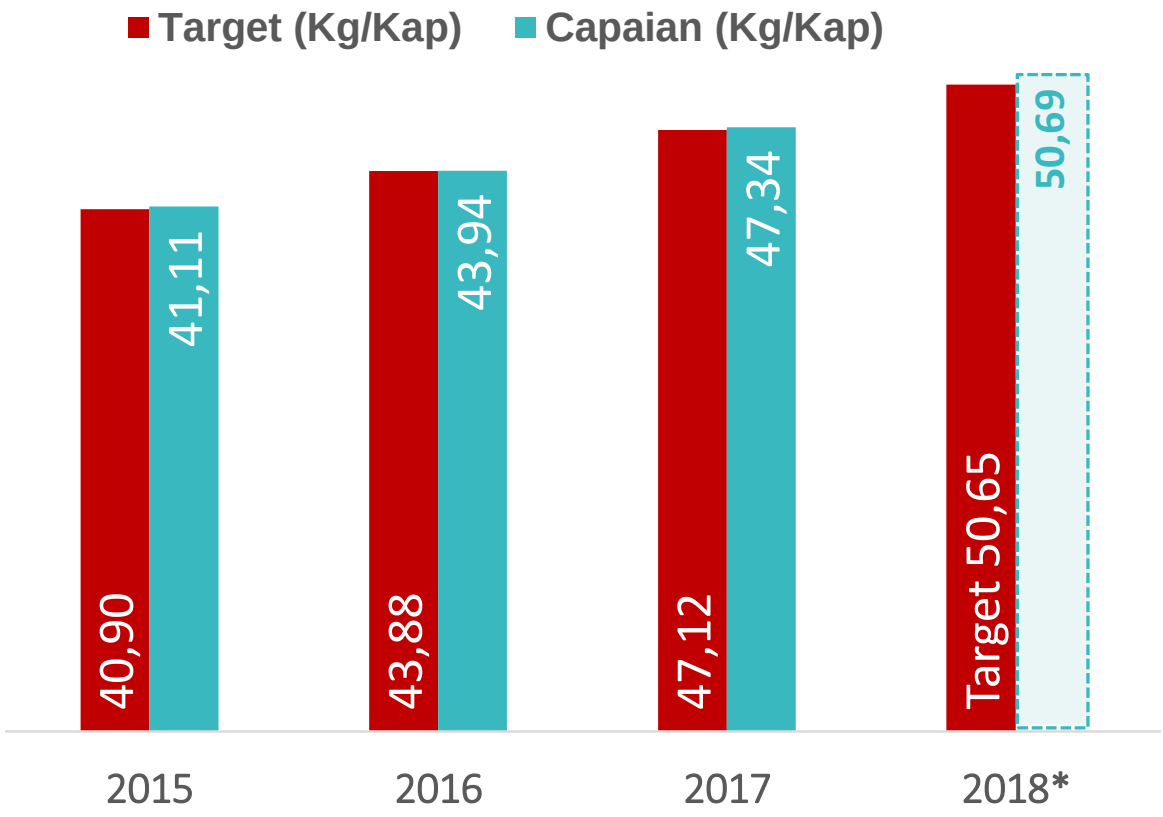

Sumber :
*Angka Sangat Sangat Sementara, Ditjen PDS

**) Belum ditetapkan
Sumber : Komnas Kajiskan, 2017

KESEJAHTERAAN NELAYAN MENINGKAT

Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN) mengalami peningkatan paling signifikan dibandingkan indikator lainnya

NT Rata-Rata	2014	2015	2016	2017	2018
NTN	104,63	106,14	108,24	109,86	113,28
NTPi	101,42	99,65	98,96	99,09	100,80
NTP	102,68	102,39	102,82	104,05	105,99
NTUN	107,37	108,63	117,57	123,01	126,68
NTUPi	105,9	106,61	108,62	110,23	113,27
NTUP	106,45	107,55	112,35	115,56	118,87

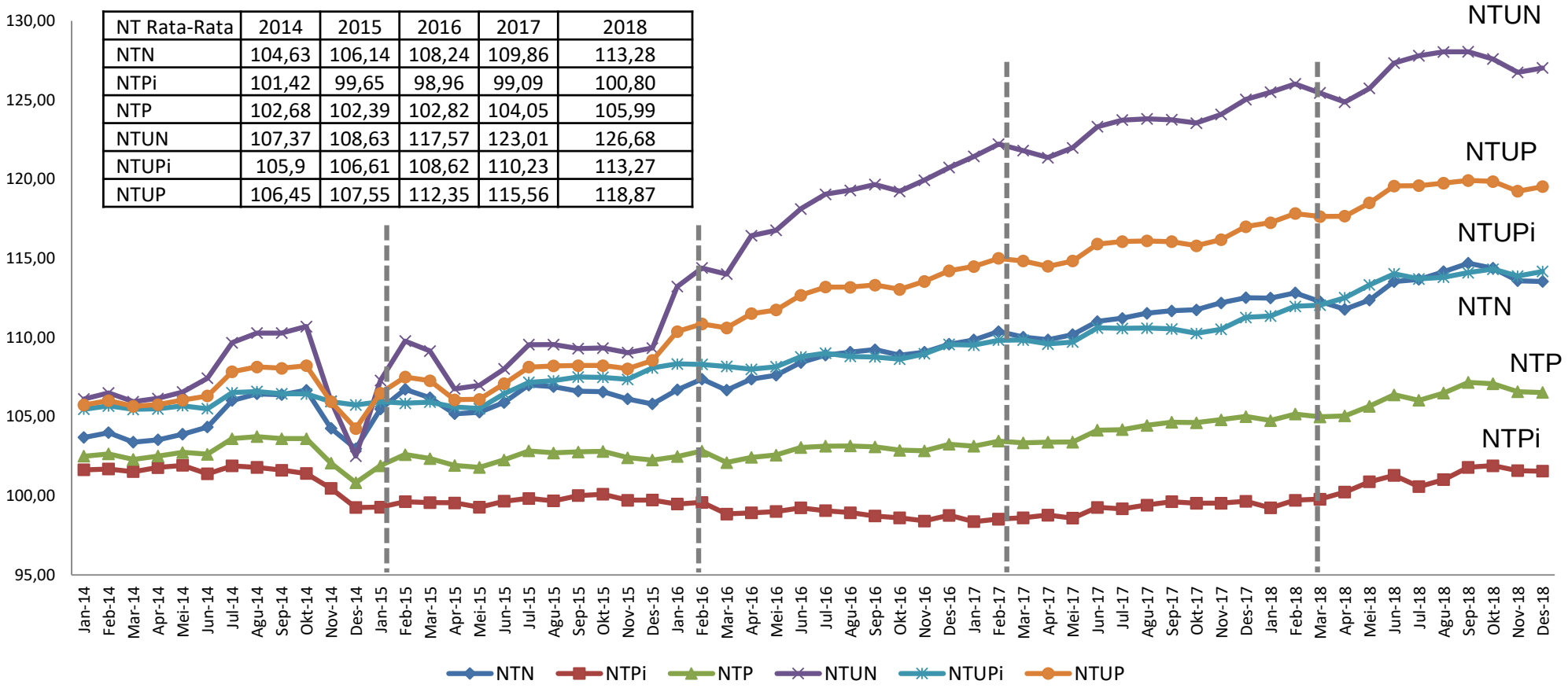

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

NTP : Nilai Tukar Perikanan
NTUP : Nilai Tukar Usaha Perikanan
NTN : Nilai Tukar Nelayan
NTUN : Nilai Tukar Usaha Nelayan
NTPi : Nilai Tukar Pembudidaya Ikan
NTUPi : Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan

Sumber : Badan Pusat Statistik

UKURAN TANGKAPAN NELAYAN TRADISIONAL MENINGKAT

Tangkapan cakalang di pesisir Kaimana

Kerapu Cina di Merauke

Lobster tangkapan di Kepulauan Aru

PEMASUKAN NEGARA DARI BIDANG PERIKANAN

Penerimaan pajak sektor perikanan:

Rp 936 M di tahun 2017 → Rp 1.554 M di tahun 2018

Penerimaan Negara Bukan Pajak:

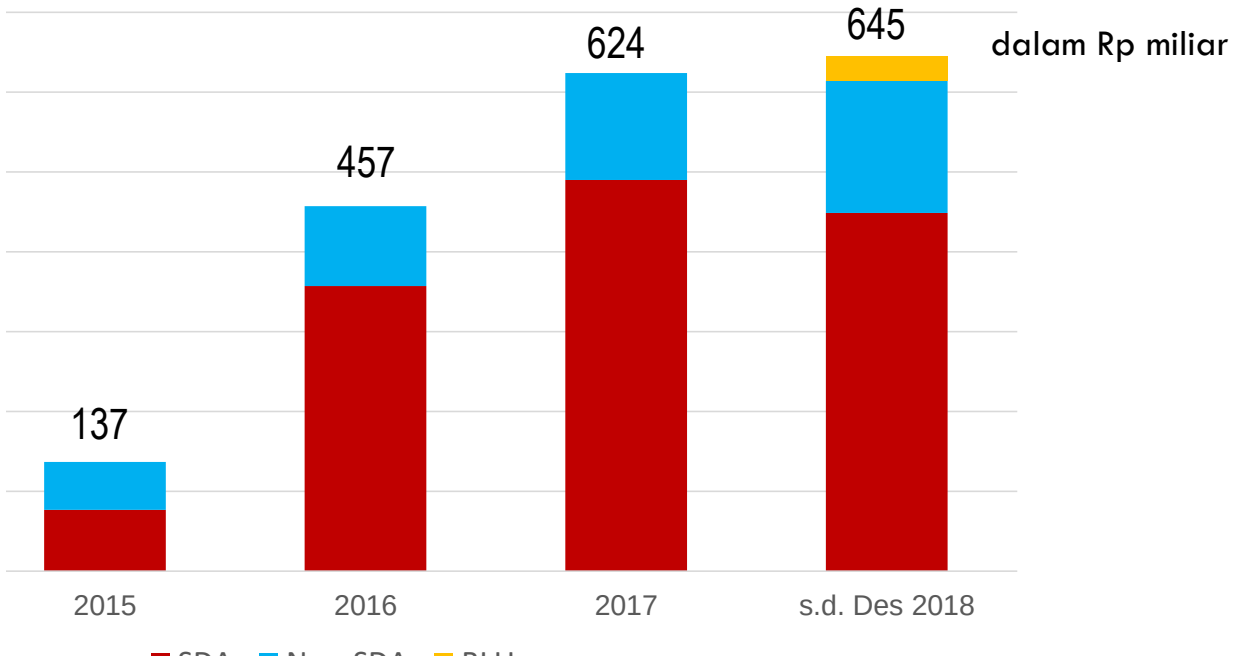

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- TNI AL, KKP, Bakamla, dan semua unsur yang memiliki aparatur di laut mempertegas sikap dalam melindungi kedaulatan Indonesia dengan cara meningkatkan intensitas kegiatan patroli di wilayah perbatasan, dan menindak tegas KIA yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di WPP RI.
- Kementerian Luar Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya segera menyelesaikan penyelesaian perbatasan dan merevisi MoU (*common guidelines*) yang selama ini dijadikan *loophole* bagi negara lain untuk melakukan *illegal fishing.*
- Dibutuhkan latihan gabungan bersama seluruh unsur penegakan laut dalam rangka menjaga laut Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan, untuk dilakukan secara periodik untuk membangun persamaan persepsi, persamaan pemahaman tentang prosedur, serta peningkatan keterampilan personil penegakan hukum.
- Konsep dan pemikiran transformasi kelembagaan SATGAS 115 yang dibentuk oleh Presiden perlu dipikirkan seacara sungguh-sungguh menjadi suatu kelembagaan yang tujuannya mewadahi *integrated criminal justice system* di bidang kelautan dan perikanan (UU 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat menjadi contoh).